



PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN, PENGISIAN SPT 1721 PEGAWAI TERHADAP PELAPORAN SPT 1721 PADA DINAS ZYX

Aditya Nuraini Nugroho^{1)*}, Suprihatiningsih²⁾, Suratno³⁾, Tika Syahfalina⁴⁾

¹Politeknik Dharma Patria Kebumen, adityanuraini1@gmail.com

²Politeknik Dharma Patria Kebumen, suprihatiningsih499@gmail.com

³Politeknik Dharma Patria Kebumen, suratno26@gmail.com

⁴Politeknik Dharma Patria Kebumen, tika.syahfalina@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 22 Juli 2021

Disetujui : 28 Juli 2021

Dipublikasikan : 13 Oktober 2021

ABSTRAK

Kata Kunci :
Perhitungan dan
pemotongan
PPh Pasal 21,
pengisian SPT
1721, pelaporan
SPT 1721

Tujuan penelitian untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan, serta pengisian SPT 1721 terhadap pelaporan SPT 1721 pada Dinas ZYX. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif yang sebelumnya data telah diperoleh dari berbagai sumber. Total pajak terutang tahun 2019 sejumlah Rp 63.328.082 yang telah dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2020.

ABSTRACT

Keywords :
Calculation and
deduction
revenue tax
article 21, filling
SPT 1721,
reporting SPT
1721

The purpose of this study is to determine the calculation and deduction and filling of SPT 1721 against reporting SPT 1721 at the ZYX Office. In this study, using a quantitative approach with descriptive analysis methods previously data has been obtained from various sources. The total tax payable amounting to Rp 63.328.082 has been paid on March 10, 2020

PENDAHULUAN

Bagian Pemerintah Pemerintah menggunakan sistem perpajakan sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai berbagai tujuan, di antaranya adalah redistribusi pendapatan, ekonomi stabilisasi, menyediakan barang publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kombinasi dan pentingnya tujuan ini berbeda-beda untuk masing-masing negara, dan biasanya bergantung pada latar belakang politik dan ekonomi masing-masing. Dengan demikian, desain sistem perpajakan berbeda untuk setiap negara. Sementara sistem perpajakan yang baik harus efisien dan adil, pada kenyataannya, kedua tujuan ini dapat saling bertentangan. Misalnya pajak sistem mungkin efisien - dalam arti menyebabkan distorsi minimum pada ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi - tetapi juga mungkin tidak sesuai dalam pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan (Amir et al., 2013).

Sektor pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dari suatu negara dan memiliki peranan penting dalam pembiayaan negara secara menyeluruh. Manfaat yang diperoleh

masyarakat tidak secara langsung dapat dirasakan tetapi berupa fasilitas umum yang semakin memadai. Fasilitas itu berupa jalan raya, berbagai beasiswa, kesehatan, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya pajak adalah iuran wajib dari masyarakat untuk negara yang bersifat memaksa. Terdapat beberapa pungutan pajak diantaranya Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM, dan bea materai yang semua jenis pajak ini masuk ke pajak pusat.

Pegawai tetap maupun tidak tetap pada suatu instansi merupakan subjek dan objek PPh 21. Dikatakan sebagai subjek pajak atas kegiatannya dalam bekerja sedangkan dikatakan objek pajak atas hasil dari kegiatannya sebagai pegawai yaitu gaji. PPh 21 adalah pajak yang dibebankan pada mereka yang bekerja dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan yang mereka lakukan pada tempat tersebut. Sesuai UU Pajak Penghasilan di Indonesia, Wajib Pajak melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya sendiri (*self assessment*).

PPh 21 dihitung atas dasar Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan harus dibayarkan pada waktu tertentu yaitu masa pajak atau tahun pajak hal itu bertujuan untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pemotongan PPh 21 adalah pungutan yang dihasilkan dari penghasilan pegawai yang dipotong oleh pemberi kerja, bendahara dan sejenisnya kemudian disetorkan kepada kas negara.

Setelah Wajib Pajak melakukan penghitungan sendiri kemudian wajib melaporkan pajak terutangnya yang telah dihitung dan dipotong oleh pemberi kerja dengan menggunakan SPT Tahunan dan disampaikan ke KPP di wilayahnya. Penyampaian SPT Tahunan tidak melewati 31 Maret tahun berikutnya.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak

Perpajakan adalah alat kebijakan yang sangat penting. Terlebih lagi, banyak aspek perpajakan mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu penelitian tentang perpajakan menjadi sangat penting dan perlu dilakukan. Menurut (Lin & Jia, 2019) pajak adalah biaya keuangan wajib atau jenis pungutan lain yang dikenakan kepada wajib pajak (individu atau badan hukum lainnya) oleh organisasi pemerintah untuk mendanai berbagai pengeluaran publik.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan tarif PPh 21 adalah:

Tabel 1. Tarif Perpajakan Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 - Rp50.000.000	5%
Rp50.000.000– Rp250.000.000	15%
Rp 250.000.000– Rp500.000.000	25%
Lebih dari Rp500.000.000	30%

Sumber : UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dikelompokkan berdasarkan (Kemenkeu, 2016) pada Tabel 2. Penghitungan PTKP ditentukan dengan dasar keadaan pada awal Tahun Pajak atau awal bagian Tahun Pajak.

Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besaran PTKP	Tahun 2016
Wajib pajak	Rp 54.000.000
WP kawin	Rp 4.500.000
Istri bekerja dan penghasilan digabung	Rp 54.000.000
Untuk setiap tanggungan	Rp 4.500.000

Sumber: : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 14/PJ/2013, 2013) disebutkan bahwa induk SPT dan lampiran-lampirannya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Keterangan SPT 1721 PPh Pasal 21

No	Kode Formulir	Keterangan
1.	1721	Induk SPT
2.	1721-A	Lampiran I
3.	1721-A1	Lampiran I-A
4.	1721-A2	Lampiran I-B
5.	1721-B	Lampiran II
6.	1721-C	Lampiran III

Sumber : Data Diolah

Penelitian Terdahulu

Menurut (Homonta, 2014) Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang ada Indonesia dan tepat waktu dalam melaporkan SPT masa.

Menurut (Baguna et al., 2017) Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. BRI Kantor. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada suatu instansi. Hasil penelitian menyatakan bahwa perhitungan pajak penghasilan 21 pada BRI cabang Manado belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru dan kurang teliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis deskriptif yang sebelumnya data telah diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian dilaksanakan di kantor Dinas ZYX bertempat di Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data pada kantor Dinas ZYX menggunakan observasi merupakan langkah pengumpulan data langsung terjun ke lapangan penelitian, wawancara dengan narasumber terkait, dan studi literature merupakan langkah pengumpulan data dengan mempelajari beberapa sumber literature yang berkaitan.

Definisi Operasional Variabel

Sugiyono (2018) menegaskan, Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini definisi operasional variabel dapat ditunjukkan pada Tabel 4. Variabel penelitian dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki ketentuan tertentu digunakan peneliti untuk dipelajari kemudian menghasilkan kesimpulan.

Tabel 4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Perhitungan dan Pemotongan SPT 1721	Perhitungan adalah melaksanakan penghitungan besarnya PPh 21 atas gaji netto yang diperoleh selama setahun dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Pemotongan adalah melakukan pemotongan atas.	1. Penghasilan Bruto 2. Biaya Jabatan 3. Penghasilan Neto 4. PTKP 5. PKP 6. Pajak Terutang 7. Tarif Pasal 17	Nominal
2.	Pengisian SPT 1721	Pengisian SPT 1721 adalah mengisi SPT Masa PPh 21 dengan jumlah pajak yang akan disetorkan.	Petunjuk Pengisian SPT 1721	Nominal
3.	Pelaporan SPT 1721	Pelaporan SPT 1721 adalah penyampaian SPT Tahunan PPh 21 kepada Kantor Pelayanan Pajak ataupun melalui e-Filing.	1. Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai 2. Form SPT 1721 3. KPP	Nominal

Sumber : data diolah

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi merupakan langkah pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan penelitian.
2. Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada narasumber terkait.
3. Studi *literature* merupakan langkah pengumpulan data dengan mempelajari beberapa sumber *literature* yang berkaitan.

Teknik Analisis Data

1. Perhitungan dan Pemotongan SPT 1721
Perhitungan dan pemotongan SPT 1721 dengan menggunakan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a menurut Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008.
2. Pengisian SPT 1721
Pengisian dilakukan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 14/PJ/2013 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh 21 dan/atau Pasal 26.
3. Pelaporan SPT 1721

Pelaporan SPT dilakukan berdasarkan pedoman Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan SPT.

PEMBAHASAN

Data Pegawai

Tabel 5. Data Pegawai dan Penghasilan Bruto

No	Nama Pegawai	Jabatan & Status	Penghasilan kotor
1	Ir. Hj. SITI KHARISAH, MM	Kepala Kantor TK/0	211.611.139
2	Drs. H. AGUS SEPTADI	Kepala Kantor K/0	164.904.079
3	GUNAWAN WIDHI WIBOWO,SE	Sekretaris Dinas K/2	121.167.936
4	DRS,AKHMAD SUDIYONO,M.PD	Kepala Bidang K/2	114.245.292
5	DRS,SIGIT BASUKI	Kepala Bidang K/2	105.623.170
6	AGUNG SUPRI HALDOKO,SE	Kepala Bidang K/2	105.623.170
7	KHAMLA NUGRAHENI,SE.Msi.	Kepala Seksi K/2	83.368.891
8	RAJIMAN ,S.PD	Fungsional K/0	93.321.455
9	SURADAL,S.PD	Fungsional K/2	83.486.372
10	DRS.,WALDIYONO	Pelaksana K/1	78.777.132
11	DJOKO WARDOJO.S.PD	Kepala Seksi K/1	97.423.722
12	TRI NURENDAH WIDI ASTUTI,BSC	Kasubag K/1	95.291.964
13	BINI,S.Sos	Kepala Seksi K/0	91.188.353
14	HARSONO HADI	Kepala Seksi K/1	91.066.451
15	DRS.DWI BUDI NUGROHO	Kepala Seksi K/2	93.176.522
16	BUDI SAPTONO, SE	Kepala Seksi K/2	93.200.522
17	DRA,RACHMA NATALINA A	Kasubag K/1	89.259.946
18	NGADIMIN	Kepala Seksi K/2	91.225.289
19	SITI KHALIMAH, SE	Kepala Seksi K/1	87.376.027
20	SUPARMONO	Fungsional K/1	88.999.841
21	RASA RAHARJA	Fungsional K/0	84.691.210
22	RAJIMAN	Fungsional K/1	86.802.454
23	SUPRIYADI	Fungsional K/1	86.802.454
24	SUKIRNO	Fungsional K/0	82.597.272
25	SUYADI	Fungsional K/2	86.744.644
26	BUDIONO	Fungsional K/1	84.668.808
27	SOMAJI	Fungsional K/2	86.745.144
28	SLAMET	Fungsional K/2	84.652.788
29	TRI HARIYANTO,A.Md	Fungsional K/0	80.568.975
30	SUMARKO	Fungsional K/0	80.568.975
31	BEJA,A.Md	Fungsional K/2	86.643.274
32	NGUSMAN,SE	Fungsional K/1	76.781.027
33	MOH.MAKHRUS	Pelaksana TK/0	72.039.336
34	ROHYANI,SE,MM	Kepala Seksi K/2	86.746.243
35	WAHYUDI,S.IP.S.ST	Kepala Seksi K/2	102.978.622

36	TUTI JULIJANTI,A.MD	Kasubag TU K/2	79.683.663
37	WAHYU NUGROHO S.Pd.T	Fungsional K/2	64.147.245
38	AGUS TURASYONO,S.Pd	Fungsional K/1	62.456.300
39	LATIF SETIAWAN ,S.Ed.T	Fungsional K/2	64.147.245
40	AGUS SUJOKO,BA	Pelaksana K/2	78.159.387
41	WAHYU WINARSIH	Pelaksana TK/0	64.671.766
42	EKA NOVIANA,S.Kom	Pelaksana TK/0	55.978.888
43	KHOSINUDIN,A.MD	Fungsional K/2	63.564.212
44	LISTYA NUR INDRIANI,S.S	Fungsional K/0	58.925.813
45	HARI MULYONO	Pelaksana K/2	81.446.070
46	SARJIYO	Pelaksana K/1	77.473.477
47	RUSMIYATI	Pelaksana TK/0	69.080.800
48	MANISMAN	Pelaksana K/2	77.516.484
49	HARI SRIYONO	Pelaksana K/2	77.516.484
50	AGUS IRIYANTO	Pelaksana K/1	73.729.229
51	DJATMIKA HADI	Pelaksana K/1	73.729.229
52	SARIYUN	Pelaksana K/1	73.729.229
53	BEJO	Pelaksana K/1	73.729.229
54	MARDIYO	Pelaksana K/1	73.729.229
55	SUMARSIH	Pelaksana TK/0	60.392.171
56	RIA KUSUMASARI,SH	Pelaksana TK/0	53.009.062
57	RATMANTO	Pelaksana K/2	69.776.979
58	MUHRODI	Pelaksana K/2	68.147.035
59	SUSI SUHARYANTI,A.MD	Pelaksana TK/0	53.833.018
60	DAMAR FIBRANTORO,A.Md	Pelaksana K/1	57.682.667
61	NUR WIDIASTUTI,A.Md	Pelaksana K/2	57.987.165
62	MUHTAMIN	Pelaksana K/2	67.414.310
63	TAUFIQ NOOR,A.Md	Pelaksana K/0	47.187.734
64	ENGGAR SULISTYO NUGROHO	Pelaksana K/0	47.187.734
65	SLAMET	Pelaksana K/0	51.396.682
66	WAKHIDIN	Pelaksana K/2	55.417.186
67	AGUS HARTOYO	Pelaksana K/2	55.433.146
68	JATMIKA	Pelaksana K/0	51.192.042
69	ASRONI	Pelaksana K/2	48.207.213
70	YUDI SEPTIAWAN, S.SI	Pelaksana K/2	77.936.685
	Jumlah		5.615.983.307

Sumber: Dinas ZYX

Perhitungan dan Pemotongan PPh 21

Tabel 6. Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 di Dinas ZYX

No	Nama status	Uraian	Dalam Rupiah
1	Ir. Siti kharisah, MM TK/0	Penghasilan Kotor Pengurangan Biaya Jabatan 5% Iuran Pensiun Jumlah Penghasilan Bersih PTKP TK/0 PKP PPH 21 terutang	211.611.139 6.000.000 2.400.000 (8.400.000) 203.211.139 (54.000.000) 149.211.139 17.381.671
2	Drs. Sigit Basuki K/2	Penghasilan Kotor Pengurangan Biaya Jabatan 5% Iuran Pensiun Jumlah Penghasilan Bersih PTKP K/2 PKP PPH 21 terutang	105.623.170 5.281.158 2.400.000 (7.681.158) 97.942.012 (67.500.000) 30.442.012 1.522.101

Sumber: Data diolah

Daftar Perhitungan & Pemotongan PPh 21 pada Pegawai Dinas ZYX(Dalam Rupiah)

Tabel 7. Daftar Perhitungan & Pemotongan PPh 21 pada Pegawai Dinas ZYX (Dalam Rupiah)

No	Nama	Jabatan & Status	Penghasilan Kotor	Pengurangan		Penghasilan Neto	PTKP	PKP	Pajak Terutang
				Biaya Jabatan	Iuran Pensiun				
				4=5%*3	5=5%*3	6=3-4-5	7	8=6-7	9
1	Ir. Hj. Siti Kharisah, MM	Kepala Kantor TK/0	211.611.139	6.000.000	2.400.000	203.211.139	54.000.000	149.211.139	17.381.671
2	Drs. H. Agus Septadi	Kepala Kantor K/0	164.904.079	6.000.000	2.400.000	156.504.079	58.500.000	98.004.079	9.700.612
3	Gunawan Widhi Wibowo,SE	Sekretaris Dinas K/2	121.167.936	6.000.000	2.400.000	112.767.936	67.500.000	45.267.936	2.263.397
4	Drs,Akhmad Sudiyono,M.Pd	Kepala Bidang K/2	114.245.292	5.712.265	2.400.000	106.133.027	67.500.000	38.633.027	1.931.651
5	Drs,Sigit Basuki	Kepala Bidang K/2	105.623.170	5.281.159	2.400.000	97.942.012	67.500.000	30.442.012	1.522.101
6	Agung Supri Haldoko,SE	Kepala Bidang	105.623.170	5.281.159	2.400.000	97.942.012	67.500.000	30.442.012	1.522.101


		K/2								
7	Khamla Nugraheni,SE. MSi.	Kepala Seksi K/2	83.368.891	4.168.445	2.400.000	76.800.446	67.500.000	9.300.446	465.022	
8	Rajiman ,S.Pd	Fungsional K/0	93.321.455	4.666.073	2.400.000	86.255.382	58.500.000	27.755.382	1.387.769	
9	Suradal,S.Pd	Fungsional K/2	83.486.372	4.174.319	2.400.000	76.912.053	54.000.000	22.912.053	1.145.603	
10	Drs.,Waldiyono	Pelaksana K/1	78.777.132	3.938.857	2.400.000	72.438.275	63.000.000	9.438.275	471.914	
11	Djoko Wardojo.S.Pd	Kepala Seksi K/1	97.423.722	4.871.186	2.400.000	90.152.536	63.000.000	27.152.536	1.357.627	
12	Tri Nurendah Widi Astuti,BSC	Kasubag K/1	95.291.964	4.764.598	2.400.000	88.127.366	63.000.000	25.127.366	1.256.368	
13	Bini,S.Sos	Kepala Seksi K/0	91.188.353	4.559.418	2.400.000	84.228.935	58.500.000	25.728.935	1.286.447	
14	Harsono Hadi	Kepala Seksi K/1	91.066.451	4.553.323	2.400.000	84.113.128	63.000.000	21.113.128	1.055.656	
15	Drs.Dwi Budi Nugroho	Kepala Seksi K/2	93.176.522	4.658.826	2.400.000	86.117.696	67.500.000	18.617.696	930.885	
16	Budi Saptono, SE	Kepala Seksi K/2	93.200.522	4.660.026	2.400.000	86.140.496	67.500.000	18.640.496	932.025	
17	Dra,Rachma Natalina A	Kasubag K/1	89.259.946	4.462.997	2.400.000	82.396.949	63.000.000	19.396.949	969.847	
18	Ngadimin	Kepala Seksi K/2	91.225.289	4.561.264	2.400.000	84.264.025	67.500.000	16.764.025	838.201	
19	Siti Khalimah, SE	Kepala Seksi K/1	87.376.027	4.368.801	2.400.000	80.607.226	63.000.000	17.607.226	880.361	
20	Suparmono	Fungsional K/1	88.999.841	4.449.992	2.400.000	82.149.849	63.000.000	19.149.849	957.492	
21	Rasa Raharja	Fungsional K/0	84.691.210	4.234.561	2.400.000	78.056.650	58.500.000	19.556.650	977.832	
22	Rajiman	Fungsional K/1	86.802.454	4.340.123	2.400.000	80.062.331	63.000.000	17.062.331	853.117	
23	Supriyadi	Fungsional K/1	86.802.454	4.340.123	2.400.000	80.062.331	63.000.000	17.062.331	853.117	
24	Sukirno	Fungsional K/0	82.597.272	4.129.864	2.400.000	76.067.408	58.500.000	17.567.408	878.370	
25	Suyadi	Fungsional K/2	86.744.644	4.337.232	2.400.000	80.007.412	67.500.000	12.507.412	625.371	
26	Budiono	Fungsional K/1	84.668.808	4.233.440	2.400.000	78.035.368	63.000.000	15.035.368	751.768	
27	Somaji	Fungsional K/2	86.745.144	4.337.257	2.400.000	80.007.887	67.500.000	12.507.887	625.394	
28	Slamet Tri Hariyanto,A.Md	Fungsional K/2	84.652.788	4.232.639	2.400.000	78.020.149	67.500.000	10.520.149	526.007	
29		Fungsional K/0	80.568.975	4.028.449	2.400.000	74.140.526	58.500.000	15.640.526	782.026	

30	Sumarko	Fungsional K/0	80.568.975	4.028.449	2.400.000	74.140.526	58.500.000	15.640.526	782.026
31	Beja,A.Md	Fungsional K/2	86.643.274	4.332.164	2.400.000	79.911.110	67.500.000	12.411.110	620.556
32	Ngusman,SE	Fungsional K/1	76.781.027	3.839.051	2.400.000	70.541.976	63.000.000	7.541.976	377.099
33	Moh.Makhrus	Pelaksana TK/0	72.039.336	3.601.967	2.400.000	66.037.369	54.000.000	12.037.369	601.868
34	Rohyani,SE,M M	Kepala Seksi K/2	86.746.243	4.337.312	2.400.000	80.008.931	67.500.000	12.508.931	625.447
35	Wahyudi,S.Ip.S .St	Kepala Seksi K/2	102.978.622	5.148.931	2.400.000	95.429.691	67.500.000	27.929.691	1.396.485
36	Tuti Julijanti,A.Md	Kasubag TU K/2	79.683.663	3.984.183	2.400.000	73.299.480	67.500.000	5.799.480	289.974
37	Wahyu Nugroho S.Pd.T	Fungsional K/2	64.147.245	3.207.362	2.400.000	58.539.883	67.500.000	-	-
38	Agus Turasyono,S.Pd	Fungsional K/1	62.456.300	3.122.815	2.400.000	56.933.485	63.000.000	-	-
39	Latif Setiawan ,S.Ed.T	Fungsional K/2	64.147.245	3.207.362	2.400.000	58.539.883	67.500.000	-	-
40	Agus Sujoko,Ba	Pelaksana K/2	78.159.387	3.907.969	2.400.000	71.851.418	67.500.000	4.351.418	217.571
41	Wahyu Winarsih	Pelaksana TK/0	64.671.766	3.233.588	2.400.000	59.038.178	54.000.000	5.038.178	251.909
42	Eka Noviana,S.Kom	Pelaksana TK/0	55.978.888	2.798.944	2.400.000	50.779.944	54.000.000	-	-
43	Khosinudin,A. Md	Fungsional K/2	63.564.212	3.178.211	2.400.000	57.986.001	67.500.000	-	-
44	Listya Nur Indriani,S.S	Fungsional K/0	58.925.813	2.946.291	2.400.000	53.579.522	58.500.000	-	-
45	Hari Mulyono	Pelaksana K/2	81.446.070	4.072.304	2.400.000	74.973.767	67.500.000	7.473.767	373.688
46	Sarjiyo	Pelaksana K/1	77.473.477	3.873.674	2.400.000	71.199.803	63.000.000	8.199.803	409.990
47	Rusmiyati	Pelaksana TK/0	69.080.800	3.454.040	2.400.000	63.226.760	54.000.000	9.226.760	461.338
48	Manisman	Pelaksana K/2	77.516.484	3.875.824	2.400.000	71.240.660	67.500.000	3.740.660	187.033
49	Hari Sriyono	Pelaksana K/2	77.516.484	3.875.824	2.400.000	71.240.660	67.500.000	3.740.660	187.033
50	Agus Iriyanto	Pelaksana K/1	73.729.229	3.686.461	2.400.000	67.642.768	63.000.000	4.642.768	232.138
51	Djatmika Hadi	Pelaksana K/1	73.729.229	3.686.461	2.400.000	67.642.768	63.000.000	4.642.768	232.138
52	Sariyun	Pelaksana K/1	73.729.229	3.686.461	2.400.000	67.642.768	63.000.000	4.642.768	232.138
53	Bejo	Pelaksana K/1	73.729.229	3.686.461	2.400.000	67.642.768	63.000.000	4.642.768	232.138
54	Mardiyo	Pelaksana K/1	73.729.229	3.686.461	2.400.000	67.642.768	63.000.000	4.642.768	232.138
55	Sumarsih	Pelaksana TK/0	60.392.171	3.019.609	2.400.000	54.972.562	54.000.000	972.562	48.628
56	Ria Kusumasari,SH	Pelaksana TK/0	53.009.062	2.650.453	2.400.000	47.958.609	54.000.000	-	-
57	Ratmanto	Pelaksana	69.776.979	3.488.849	2.400.000	63.888.130	67.500.000	-	-

Sumber: Dinas ZYX

Pengisian SPT 1721

Gambar 1. Pengisian Formulir SPT 1721

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	FORMULIR 1721
<ul style="list-style-type: none"> ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK BERI TANDA "X" DALAM <input type="checkbox"/> (KOTAK) YANG SESUAI ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN 		TAHUN TAKWIM <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 2 0 1 9 </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> NPWP PEMOTONG PAJAK : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0 0 3 5 2 2 1 7 4 5 2 3 0 0 0</div> NAMA PEMOTONG PAJAK : BEND. GAJI DINAS ZYX ALAMAT PEMOTONG PAJAK : KEBUMEN KELURAHAN / KECAMATAN : TAMANWINANGUN / KEBUMEN KOTA : KEBUMEN NO. TELEPON / FAKSIMILI : (0287) 381462 JENIS USAHA : KANTOR DINAS NAMA PIMPINAN : IR. HU. SITI KHARISAH MM </div> <div style="width: 35%;"> KODE POS : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5 4 3 1 3</div> KLU : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> </div> </div>			
A. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :			
GOLONGAN PECAHAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT) (Diisi dari Formulir 1721-A)----- ➤	70	Rp 5.615.983.307	Rp 63.328.082
2. PEGAWAI TIDAK TETAP-PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Formulir 1721-B)----- ➤			
3. J U M L A H (1 + 2)----- ➤	70	Rp 5.615.983.307	Rp 63.328.082
4. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (Diisi dari Formulir 1721-A dan 1721-B)----- ➤			
5. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 HARUS DISETOR (Angka a 3 kolom 4 - Angka 4)----- ➤			Rp 63.328.082
6. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG TELAH DISETOR----- ➤			
7. STP PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 (Hanya Pokok Pajak)----- ➤			
8. J U M L A H (6 + 7)----- ➤			
9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (Angka 5 - Angka 8)----- ➤			Rp 63.328.082
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (Angka 8 - Angka 5)----- ➤			
JUMLAH PADA ANGKA 9a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL-----			
B. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 9 b DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 UNTUK BULAN TAHUN			
C. LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN 1721-A, 1721-A1, ATAU 1721-A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA : <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 1. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 2. <input type="checkbox"/> DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP YANG PPh-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH 3. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS 4. <input checked="" type="checkbox"/> PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU ALAMAT </div> <div style="width: 45%;"> 5. <input type="checkbox"/> DAFTAR BIAYA UNTUK WAJIB PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN 6. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI 7. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI IKTA KARYAWAN ASING 8. DAFTAR PERHITUNGAN PPh PASAL 21 </div> </div>			
D. PERNYATAAN DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA </div> <div style="width: 55%;"> TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN SARIYUN 196310121985031000 </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> KEBUMEN, 10 MARET 2020 (Tempat) (Tanggal) </div>			

Sumber : Data diolah
Gambar 2. Pengisian Formulir 1721-A


 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)	FORMULIR 1721 - A TAHUN TAKWIM <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 2 0 1 9 </div>			
NPWP PEMOTONG PAJAK : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">003522174523000</div>					
NAMA PEMOTONG PAJAK : DINAS ZYX					
A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP					
NO. ULRUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rupiah)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ir. Hj. SITI KHARISAH, MM	49.242.457.6-523.000	Rp. 211.611.139	Rp. 17.381.671	
2	Drs. H. AGUS SEPTADI	08.891.454.1-523.000	Rp. 164.904.079	Rp. 9.700.613	
3	GUNAWAN WIDHI WIBOWO, SE	24.175.310.2-523.000	Rp. 121.167.936	Rp. 2.063.397	
4	DRS. AKHMAD SUDIYONO, M.PD	07.088.050.5-523.000	Rp. 114.345.292	Rp. 1.931.651	
5	DRS. SIGIT BASUKI	58.227.915.4-523.000	Rp. 105.623.170	Rp. 1.522.101	
6	AGUNG SUPRI HALDOKO, SE	78.133.761.3-523.000	Rp. 105.623.170	Rp. 1.522.101	
7	KHAMLA NUGRAHENI, SE, Msi.	09.293.994.1-109.000	Rp. 83.368.891	Rp. 465.022	
8	RAJIMAN, S.PD	08.893.516.8-523.000	Rp. 93.321.455	Rp. 1.387.769	
9	SURADAL, S.PD	48.989.139.0-523.000	Rp. 83.486.372	Rp. 1.145.603	
10	DRS., WALDIYONO	57.881.171.3-523.000	Rp. 78.777.132	Rp. 471.914	
11	DJOKO WARDOJO, S.PD	78.133.690.7-523.000	Rp. 97.423.722	Rp. 1.337.627	
12	TRI NURENDAH WIDI ASTUTI, BSC	47.587.909.4-523.000	Rp. 95.291.964	Rp. 1.256.368	
13	BINI, S.Sos	58.227.934.5-523.000	Rp. 91.188.353	Rp. 1.286.447	
14	HARSONO HADI	58.227.934.5-523.000	Rp. 91.066.451	Rp. 1.055.656	
15	DRS. DWI BUDI NUGROHO	49.131.268.2-523.000	Rp. 93.176.522	Rp. 930.885	
16	BUDI SAPTONO, SE	58.227.919.6-523.000	Rp. 93.200.522	Rp. 932.025	
17	DRA. RACHMA NATALINA A	58.227.918.8-523.000	Rp. 89.259.946	Rp. 909.847	
18	NGADIMIN	58.227.940.2-523.000	Rp. 91.225.289	Rp. 838.201	
19	SITI KHALIMAH, SE	45.431.870.0-523.000	Rp. 87.376.007	Rp. 680.161	
20	SUPARMONO	49.497.342.3-531.000	Rp. 88.999.841	Rp. 957.492	
70	YUDI SEPTIAWAN, S.Si	48.475.933.7-532.000	Rp. 77.936.685	Rp. 306.993	
• JUMLAH - YANG MEMPUYAI NPWP - YANG TIDAK MEMPUYAI NPWP		➤ 50 ORANG ➤ 49 ORANG ➤ 1 ORANG	Rp. 4.462.891.631	Rp. 63.328.082	
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP		➤ 20 ORANG	Rp. 1.153.091.676		
C. JUMLAH A + B		➤ 70 ORANG	Rp. 5.615.983.307	Rp. 63.328.082	

- Catatan:
1. Pindahkan jumlah orang pada C ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (2)
 2. Pindahkan jumlah C kolom (4) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (3)
 3. Pindahkan jumlah C kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (4)
 4. Pindahkan jumlah C kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4
 5. Jika ruangan Formulir ini tidak cukup dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk Formulir ini

Sumber : Data diolah

Note: data lengkap dapat dilihat pada daftar perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 tahun 2019

Gambar 3. Pengisian Formulir 1721-A2

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN I-B SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	LBR. 1: UNTUK KPP LBR. 2: UNTUK BENDAHARAWAN PEMOTONG PAJAK LBR. 3: UNTUK PEGAWAI			
	PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA, DAN PENSUNANNYA	FORMULIR 1721 - A2			
	• BERI TANDA X DALAM <input type="checkbox"/> (KOTAK) YANG SESUAI	TAHUN TAKWIM <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> </tr> </table>	2	0	1
2	0	1	9		

PERHATIAN - PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT. TASPEN, PT. ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

NOMOR URUT : 001 NAMA INSTANSI / BADAN LAIN : DINAS ZYX NPWP BENDAHARAWAN : 0 0 3 3 2 2 1 7 4 3 2 3 0 0 0 NAMA BENDAHARAWAN : BEND. GAJI DINAS ZYX ALAMAT BENDAHARAWAN : KEBUMEN NAMA PEGAWAI / PENSUNAN : Ir. Hj. SITI KHARISAH, MM NIP / NRP : 196212081987032000 NPWP PEGAWAI / PENSUNAN : 4 9 2 4 2 4 6 7 6 5 2 3 0 0 0 ALAMAT PEGAWAI / PENSUNAN : DUKUH GONDANG RT 02/08 KUWAYUHAN PANGKAT / GOLONGAN : PEMBINA MUDA UTAMA / IV C JABATAN : KEPALA KANTOR STATUS DAN JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/..... TK/0 HB/..... MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 01 s.d 12	
---	--

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI POKOK / PENSUNAN	Rp	76,046,800
2.	TUNJANGAN ISTERI	Rp	-
3.	TUNJANGAN ANAK	Rp	-
4.	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)	Rp	76,046,800
5.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	Rp	108,000,000
6.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	Rp	26,325,060
7.	TUNJANGAN BERAS	Rp	889,040
8.	TUNJANGAN KHUSUS	Rp	-
9.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	Rp	570,480
10.	JUMLAH (4 s.d. 9)	Rp	211,611,139
• PENGURANGAN			
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN	Rp	6,000,000
12.	JURAN PENSUN ATAU JURAN THP	Rp	2,400,000
13.	JUMLAH PENGURANGAN (11+12)	Rp	8,400,000
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13)	Rp	203,211,139
15.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETIAHUN / DISETAHUNKAN)	Rp	203,211,139
16.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Rp	54,000,000
17.	PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16)	Rp	149,211,139
18.	PPh PASAL 21 TERUTANG	Rp	17,381,671
19.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	Rp	-
20.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input checked="" type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (18-19) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (19-18)	Rp	17,381,671

B. • PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAIKAN ☐ PINDAIAN ☐ BARU ☐ PENSUN

C.


KEMAHAN, 10/01/2020
(Tempat) (Tanggal)
BENDAHARAWAN

SARITUN
NIP / NRP 196210121987031000

Catatan: Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan keperluan.
D.1.1.32.49

Sumber : Data diolah

Gambar 4. Pengisian Formulir 1721-B

 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN II SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	FORMULIR 1721 - B	
DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI			TAHUN TAKWIM <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 2 0 1 9 </div>	
NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 0 3 5 2 2 1 7 4 5 2 3 0 0 0		NAMA PEMOTONG PAJAK : DINAS /YK		
RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERBUTANG SEBAGAI BERIKUT :				
No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp/yr)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIIF (Rp/yr)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERBUTANG (Rp/yr)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	• PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL 1. PEGAWAI HARIAN TERPES DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK ORANG 2. PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ORANG 3. PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA PDI, ASURANSI DAN PENJAJA BARANG) DAGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP, BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TERPES ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ORANG 4. KOMISARIS / ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TERPES, SEBANYAK ORANG 5. DISTRIBUTOR MLM / DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA, SEBANYAK ORANG 6. MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG 7. PESERTA PROGRAM PENSUNAN, SEBANYAK ORANG 8. TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK) DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENJAJA DAN AKTUARIS, SEBANYAK ORANG • PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL 9. PENERIMA UANG PISANGON, UANG TERBESAN PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS : a. MANTAN PEGAWAI BUKAN PENERIMA PENSUN SEBANYAK ORANG b. TERMASUK PEGAWAI TETAP / PENERIMA PENSUN PADA FORMULIR 1721-A SEBANYAK ORANG 10. PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, DAN PENSUNAN, SEBANYAK ORANG • PPh PASAL 26 11. PEGAWAI / PEMERIKSA LOKAL DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ORANG 12. JUMLAH 1 s.d. 11 (Keseluruhan) : ORANG			

Catatan :

1. Masukkan angka 02 (jumlah 1 s.d. 11 kolom 9b) : orang pada kolom (2) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (2);
2. Masukkan jumlah pada kolom (3) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (3);
3. Masukkan jumlah pada kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (4);
4. Masukkan jumlah pada kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4.

D.1.1.32.50

Sumber : Data diolah

Gambar 5. Pengisian Formulir 1721-C

FORMULIR 1721-C
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

TAHUN TAKWIM: 2019

NPWP: 6030211245230000 NAMA PEMOTONG PAJAK: DINAS ZYX

BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH PASAL 21 / PASAL 20 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-	-	-	-	-

BAGIAN B : TENAGA AHLI

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JENIS KEAHLIAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENGHARGAAN TENAGA (Rp)	PPH PASAL 21 / PASAL 20 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	-	-	-	-	-	-

Catatan: - Bila menggunakan Formulir ini tidak cukup dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk Formulir ini.

D.I.1.32.51

Sumber : Data diolah

Prosedur Pelaporan SPT 1721

1. Buat daftar perhitungan PPh Pasal 21 semua pegawai
2. Buat bukti potong Formulir SPT 1721 A2 untuk semua pegawai
3. Masukkan data perhitungan PPh 21 untuk semua pegawai tetap yang mempunyai NPWP ataupun tidak mempunyai NPWP ke Formulir SPT 1721 A
4. Masukkan data perhitungan PPh Pasal 21 bagi semua pegawai tidak tetap pada Formulir SPT 1721 B
5. Masukkan data perhitungan PPh Pasal 21 semua pengurus, komisaris, dan pengawas dan tenaga ahli (jika ahli) pada Formulir SPT 1721 C
6. Dari poin 3,4 dan 5 masukkan semua hasil perhitungannya ke Formulir Utama SPT 1721 sesuai petunjuk yang sudah tertera
7. Lakukan pelaporan SPT 1721 paling lambat 31 Maret 2020

Pelaporan SPT 1721

Menurut Mardiasmo (2019) batas penyampaian SPT adalah untuk SPT Masa, maksimal 20 hari dari akhir Masa Pajak. Khusus SPT Masa PPh maksimal akhir bulan berikutnya. SPT Tahunan PPh, WP orang pribadi, maksimal 3 bulan tahun berikutnya. Kemudian untuk SPT Tahunan PPh, WP badan, maksimal 4 bulan tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian adalah hasil perhitungan dan pemotongan PPh 21 pada Dinas ZYX untuk tahun 2019 sebesar Rp 63.328.082 dan sesuai dengan tarif PPh Pasal 17 UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Pengisian SPT 1721 pada Dinas ZYX telah sesuai dengan Peraturan DJP Nomor PER 14/PJ/2013. Pelaporan SPT 1721 tahunan telah dilaporkan oleh Dinas ZYX pada tanggal 10 Maret 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pemotongan di atas dapat diketahui bahwa perhitungan dan pemotongan serta pengisian SPT 1721 terhadap pelaporan SPT 1721 pada Dinas ZYX sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak dan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Pelaporan SPT 1721 pada Dinas ZYX telah dilaksanakan tepat pada waktunya

DAFTAR PUSTAKA

- A Dai, Rahmawaty; Illat, Ventje; Mawikere, Lidia. 2018. *Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPH Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT.xxx*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4). 2018
ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21180
- Amelia Muaya, 2016. *Analisis Perhitungan, Penetapan Dan Pelaporan PPH 21 Pada Yayasan xxx*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol.4 No.2 Juni. 2016
ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13154
- Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). *The impact of the Indonesian income tax reform: A CGE analysis. Economic Modelling*, 31(1), 492–501.
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.12.018>
- Baguna, N. L., Pangemanan, S. S., & Runtu, T. (2017). *ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR*. 12(2), 327–335.
- Homenta, H. R. (2014). *Analisis perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada cv. multi karya utama*. 3(36), 916–926.
- Kemenkeu, 2016. (2016). “*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.” Jdih.Kemenkeu.Go.Id, April, 1–4.
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan Edisi revisi 2016*. ANDI, Yogyakarta.
- Lin, B., & Jia, Z. (2019). *Tax rate, government revenue and economic performance: A perspective of Laffer curve. China Economic Review*, 56(June).
<https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.101307>
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 14/PJ/2013. (2013). *PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 14/PJ/2013*. 2009.
- Septiani, R. H. (2010). *Prosedur Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada PT. X)*
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perpajakan